

KNITTING THE PAST, UNDERSTANDING THE PRESENT: A QUALITATIVE STUDY OF THE HISTORY, SOCIO-ECONOMICS, AND POLITICS OF WEST SALONGO VILLAGE (2011-2020)

Astrit Safitri Lahiya^{1*}, Helman Manay², Andris K. Malae³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
tiaralahiya2304@gmail.com^{1*}, *helman@ung.ac.id*², *andrismalae91@gmail.com*³

**Corresponding author*

Manuscript received May 29, 2025; revised July 10, 2025; accepted July 22, 2025; Published July 23, 2025

ABSTRACT

Regional expansion is often considered a vital strategy to improve the effectiveness of local government and development. This study aims to explore the social, economic, and political dynamics of Salongo Barat Village during the period 2011-2020. The birth of this village was a response to the challenges of managing a large area, while being driven by community initiatives and support from the local government. Using a qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with key informants, village heads, community leaders, and residents, and documentation studies from village archives and policies. The results of the study show that village expansion is not just an administrative reorganization, but an effective strategy to improve public services, accelerate infrastructure development, and optimize the potential of agriculture and plantations as the main pillars of the local economy. This period also highlights how the synergy between government policies and active community participation plays a crucial role in achieving economic stability and improving welfare in Salongo Barat Village. In conclusion, the expansion of Salongo Barat Village has successfully created a sustainable and adaptive social transformation, highlighting the importance of local autonomy in promoting community welfare.

Keywords: *Village history, social history, economic history, political history*

ABSTRAK

Pemekaran wilayah seringkali dianggap sebagai strategi vital untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelami dinamika sosial, ekonomi, dan politik Desa Salongo Barat selama periode 2011-2020. Lahirnya desa ini merupakan respons terhadap tantangan pengelolaan wilayah yang luas, sekaligus didorong oleh inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta studi dokumentasi dari arsip dan kebijakan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa bukan sekadar reorganisasi administratif, melainkan strategi efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama ekonomi lokal. Periode ini juga menyoroti bagaimana sinergi antara kebijakan pemerintah

dan partisipasi aktif masyarakat berperan krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Desa Salongo Barat. Kesimpulannya, pemekaran Desa Salongo Barat berhasil menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan dan adaptif, menegaskan pentingnya otonomi lokal dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Sejarah desa, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik.

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional, sekaligus menjadi cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Keberadaannya bukan sekadar gugusan permukiman, melainkan entitas hidup yang sarat akan sejarah, nilai budaya, serta interaksi kompleks antarindividu dan kelompok (Iskandar, 2020). Undang-undang, khususnya yang memperkuat kedudukan desa, telah memberikan otonomi signifikan bagi desa untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Ini mencakup penghargaan terhadap nilai sosial budaya, hak asal-usul, adat istiadat, serta kemampuan desa dalam membentuk dan mengelola kelembagaannya sendiri (Pamungkas, 2019). Setiap desa, dengan wilayahnya yang khas dan kepemimpinan kepala desa, adalah perwujudan dari perpaduan unik antara aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Wujud ini terbentuk di muka bumi oleh interaksi elemen-elemen fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling memengaruhi, baik secara internal maupun dengan dunia luar. Pentingnya peraturan pemerintah, terutama dalam konteks historis, menjadi kunci untuk memahami bagaimana desa diatur, bahkan dengan adanya pasal-pasal khusus dalam peraturan pemerintah daerah yang secara spesifik membahas pengaturan desa (Silalah, 2023).

Desa didirikan oleh penduduk lokal, dengan mempertimbangkan akar sejarah dan konteks sosiokultural di sekitarnya. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 mengatur tentang pemekaran desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur berbagai aspek pemerintahan desa di Indonesia (Muhtadi, 2012). Pasal 2 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dan pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung (Harfi, 2016).

Kecamatan Bolaang Uki, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memiliki banyak desa dengan potensi sejarah yang menarik untuk diteliti. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki akar budaya dan sejarah panjang, desa-desa di kecamatan ini menyimpan berbagai narasi sejarah yang belum banyak tergali. Kawasan pesisir di Sulawesi memiliki peran strategis dalam jaringan perdagangan kuno, yang memungkinkan terjadinya interaksi budaya dan ekonomi dengan dunia luar. Interaksi masyarakat lokal dengan dunia luar, baik melalui perdagangan, migrasi, maupun pengaruh kolonial, telah membentuk identitas sosial dan budaya yang unik di setiap desa.

Pendekatan historis integratif yang digunakan dalam studi ini, "Merajut Masa Lalu, Memahami Masa Kini: Studi Kualitatif tentang Sejarah, Sosial Ekonomi, dan Politik Desa Salongo Barat (2011-2020)," secara eksplisit menampilkan kebaruan dan keunikan signifikan, yang kemungkinan besar belum pernah atau jarang dilakukan secara komprehensif di wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Alih-alih mengkaji aspek desa secara parsial seperti penelitian pemekaran desa umumnya, studi ini mengintegrasikan secara holistik dimensi sejarah, sosial, ekonomi, dan politik Desa Salongo Barat dalam rentang waktu spesifik satu dekade pasca pemekaran. Kedalaman analisis yang menelusuri benang merah transformasi desa dari inisiasi pemekaran hingga adaptasi masyarakat terhadap kebijakan dan perubahan yang terjadi, dipadukan dengan konteks lokal yang kaya akan potensi sejarah yang belum tergali di Bolaang Mongondow Selatan, menjadikan penelitian ini kontribusi penting dan relevan dalam pemahaman dinamika pembangunan desa.

Studi tentang desa menjadi semakin relevan ketika kita ingin memahami bagaimana perubahan sosial dan kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput (Syahputri & Katimin, 2024). Desa Salongo Barat, sebuah entitas yang lahir dari dinamika pemekaran wilayah, menawarkan konteks yang kaya untuk mengkaji evolusi sejarah, sosial-ekonomi, dan politiknya. Periode 2011-2020 merupakan dekade yang krusial bagi desa ini, ditandai dengan berbagai kebijakan nasional maupun lokal, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Memahami jejak masa lalu Desa Salongo Barat, mulai dari akar sejarahnya, bagaimana masyarakatnya berinteraksi dalam lingkup sosial-ekonomi, hingga intrik-intrik politik yang membentuknya, akan memberikan lensa yang jernih untuk memahami kondisi masa kininya.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini, dengan judul "Merajut Masa Lalu, Memahami Masa Kini: Studi Kualitatif tentang Sejarah, Sosial Ekonomi, dan Politik Desa Salongo Barat (2011-2020)", bertujuan untuk menelusuri secara mendalam perjalanan Desa Salongo Barat dalam kurun waktu tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali narasi, pengalaman, dan persepsi masyarakat serta pemangku kepentingan, guna mengungkap benang merah yang menghubungkan sejarah, kondisi sosial-ekonomi, dan dinamika politik desa. Harapannya, studi ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang desa, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif yang dapat

menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat dan berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif interpretatif dengan berlandaskan pada model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) untuk menyelami dinamika sosial, ekonomi, dan politik Desa Salongo Barat dari tahun 2011 hingga 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Sangadi, tokoh masyarakat, dan warga desa yang dipilih secara purposif untuk menangkap beragam perspektif, serta studi dokumentasi dari arsip desa. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif dan siklis, dimulai dengan reduksi data melalui transkripsi, *koding*, dan *memo writing* untuk menyaring serta memfokuskan informasi relevan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana informasi diorganisir dalam bentuk narasi tematik dan matriks guna memperjelas pola dan hubungan antar data. Proses diakhiri dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang melibatkan konseptualisasi, perbandingan dengan teori, dan yang terpenting, triangulasi sumber data membandingkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen guna memastikan validitas, kedalaman, dan interpretasi yang komprehensif atas dinamika desa tersebut (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menelusik Jejak Sejarah dan Formasi Desa Salongo Barat

Wilayah desa yang terlalu luas seringkali menjadi penghambat signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Jangkauan kendali pemerintahan yang terlalu lebar, ditambah dengan populasi yang terus bertambah, acapkali memicu aspirasi masyarakat untuk membentuk desa baru. Akses yang jauh ke pusat pemerintahan desa, serta birokrasi yang berbelit dalam mengakses layanan publik, kerap dianggap sebagai kendala utama yang merintangi peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, pembentukan desa baru muncul sebagai solusi strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Harapannya, pelayanan yang diberikan akan lebih optimal dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mendrofa et al., 2023).

Untuk membedah dinamika perubahan Desa Salongo Barat yang terjadi akibat pemekaran, penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan teoritik yang relevan, seperti Teori Transformasi Sosial dan Teori Pembangunan Lokal. Pendekatan-pendekatan ini akan membantu menganalisis secara lebih mendalam bagaimana faktor-faktor pendorong pemekaran dan proses yang terjadi memengaruhi struktur, fungsi, serta arah pembangunan desa.

Teori transformasi sosial sangat relevan untuk menganalisis perubahan fundamental dalam struktur sosial, pola interaksi, dan nilai-nilai masyarakat akibat pemekaran desa. Pemekaran dapat dipandang sebagai agen transformasi yang mengubah tatanan administratif desa, memicu reorganisasi komunitas, serta berpotensi mengubah relasi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Ini adalah proses dinamis yang membentuk ulang cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan dan sistem pemerintahan mereka. Melalui lensa teori transformasi sosial, kami dapat menganalisis bagaimana peran Sangadi, tokoh masyarakat, dan partisipasi warga dalam proses pemekaran mencerminkan upaya kolektif untuk merespons tekanan struktural, seperti luasnya wilayah desa induk, padatnya populasi, dan kendala akses layanan. Pembentukan pemerintahan baru di Desa Salongo Barat dapat dilihat sebagai transformasi dari sistem yang kurang efisien menjadi sistem yang diharapkan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi ini akan menelusuri bagaimana masyarakat beradaptasi dengan identitas dan struktur desa yang baru, serta bagaimana perubahan ini memengaruhi kohesi sosial dan praktik-praktik budaya local (Castells, 2010).

Teori pembangunan lokal fokus pada bagaimana inisiatif dan kapasitas yang berasal dari dalam komunitas, serta intervensi dari luar, berinteraksi untuk mendorong pembangunan di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, pemekaran desa diinterpretasikan sebagai strategi pembangunan lokal yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan mempercepat pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Teori ini menekankan pentingnya peran aktor lokal dalam mengidentifikasi masalah, memobilisasi sumber daya, dan merumuskan solusi pembangunan yang sesuai dengan konteks spesifik mereka. Dalam kasus Desa Salongo Barat, teori pembangunan lokal membantu kita memahami bahwa inisiatif pemekaran muncul dari kapasitas lokal yang kuat, terbukti dari partisipasi aktif masyarakat dan Sangadi, serangkaian musyawarah warga yang masif, dan pembentukan panitia pemekaran. Keberadaan potensi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp100 juta juga menunjukkan aspek sumber daya yang menjadi katalisator penting bagi pembangunan lokal. Analisis ini akan mengkaji bagaimana pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat akses terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan, serta bagaimana upaya pemerataan pembangunan pasca pemekaran berinteraksi dengan kebijakan otonomi desa dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Salongo Barat (Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, 2017).

Proses pemekaran Desa Salongo Barat berawal dari inisiatif kuat masyarakat dan Sangadi Desa Salongo. Mereka melihat adanya potensi besar dan kebutuhan mendesak untuk pengembangan wilayah, terutama dengan informasi mengenai potensi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 100 juta. Menyadari urgensi tersebut, pada tahun 2010, perwakilan desa kemudian menghadap Bupati Bolaang Mongondow Selatan saat itu, Rudi Mongilong, menyampaikan bahwa Desa Salongo memiliki wilayah yang sangat luas dan layak dimekarkan.

Harson Ahaya, Ketua Panitia Pemekaran Desa Salongo dan Pembentukan Desa Salongo Barat, mengungkapkan bahwa ide pemekaran ini muncul pada tahun 2011. Saat itu, Desa Salongo yang awalnya terdiri dari empat dusun, merupakan desa terluas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang baru diresmikan pada tahun 2008. Melihat kondisi ini, Harson Ahaya bersama Kepala Dusun 3, Suharto Katili, dan Kepala Dusun 4, Ahyar Nggai, aktif berdiskusi mengenai urgensi pemekaran demi pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Pembicaraan ini tak berhenti di kalangan terbatas; isu pemekaran meluas menjadi perbincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat, dari buruh, petani, hingga nelayan, mencerminkan adanya kesadaran dan dukungan kolektif. Gambar 1 di bawah ini merupakan Surat Keputusan Sangadi Desa Salongo untuk Pemekaran Desa Salongo dan Pembentukan Desa Persiapan Salongo Barat



Gambar 1. Keputusan Sangadi Desa Salongo
Sumber: Dokumen Desa (Proposal pemekaran)

Proses pemekaran Desa Salongo ditandai oleh serangkaian langkah strategis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu tonggak penting adalah Rapat Evaluasi dan Pemahaman Bersama yang diadakan pada Minggu, 28 Februari 2010, di Balai Desa Salongo. Rapat yang digagas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sangadi Salongo ini menghadirkan 146 peserta, sebuah angka yang mencerminkan besarnya dukungan masyarakat, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Pemekaran. Semangat pemekaran desa kian membara di Dusun IV pada Minggu, 17 Januari 2010. Bertempat di kediaman Kepala Dusun IV, sebuah musyawarah warga krusial diadakan, dihadiri oleh beragam elemen masyarakat, mulai dari tokoh berpengaruh hingga aparatur desa. Dari pertemuan ini, lahir pernyataan tegas dan dukungan penuh dari masyarakat Dusun IV untuk pembentukan Desa Salongo Barat, disertai permohonan bimbingan dari pemerintah dan tokoh berpengaruh.

Tak hanya itu, Musyawarah Dusun III Desa Salongo juga telah dilaksanakan pada Senin, 18 Januari 2010, di Kecamatan Bolaang Uki. Dihadiri oleh 78 orang, musyawarah ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan masyarakat dalam mendukung proses pemekaran wilayah dan memohon bimbingan dari Sangadi Salongo guna mempercepat realisasi pembentukan desa persiapan. Musyawarah-musyawarah ini menjadi bukti nyata aspirasi kuat dan kesadaran kolektif masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan serta mempercepat pembangunan melalui pemekaran wilayah administratif desa. Setelah memperoleh restu dari Bupati, proposal pemekaran Desa Salongo Barat segera disusun. Langkah selanjutnya adalah mengundang seluruh tokoh masyarakat untuk menyampaikan rencana pemekaran dan menegaskan kembali komitmen bahwa Desa Salongo akan dimekarkan. Komitmen ini tak hanya berhenti pada kata-kata, melainkan langsung diwujudkan dengan memulai proses pemekaran secara resmi. Pada saat yang sama, sebuah panitia pemekaran pun dibentuk, dengan Bapak Herson Ahaya terpilih sebagai ketuanya.

Pada tanggal 19 April 2011, sebuah langkah krusial diambil menuju pembentukan Desa Salongo Barat. Panitia Pemekaran Desa Salongo dan Pembentukan Desa Persiapan Salongo Barat secara resmi melayangkan surat bernomor 04/PP.DS/PDPSB/17/2011 kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Surat penting yang dilengkapi proposal pemekaran ini tak sekadar formalitas; ia mengandung aspirasi kuat masyarakat untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan pemerintahan yang lebih efektif. Melalui surat ini, Panitia Pemekaran memohon DPRD agar memberikan perhatian serius dan meninjau langsung lokasi calon Desa Persiapan Salongo Barat. Surat aspirasi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia ini menjadi bukti nyata semangat juang masyarakat.

Sejalan dengan itu, Demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan mendekatkan pelayanan kepada warga (Iswandari, 2021), dan telah memenuhi syarat-syarat pembentukan daerah baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan no. 129 tahun 2000 (Pp Nomor 129, Tahun 2000, Bab III, Pasal 3: Rasid Yunus, Helman Manay, 2023)

Pemerintah Kecamatan Bolaang Uki mengambil langkah proaktif pada tahun 2011. Mereka mengajukan Permohonan Pemekaran Desa Salongo kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan. Permohonan krusial ini, yang dikirimkan dari Molibagu dengan lampiran dokumen pendukung, menjadi fondasi bagi perubahan. Pada tahun yang sama, semangat peningkatan kualitas pelayanan publik juga bergelora dari akar rumput. Masyarakat Desa Salongo, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sangadi (Kepala Desa) Salongo, secara resmi mengajukan permohonan pemekaran desa kepada Camat Bolaang Uki.

Pemekaran Desa Salongo, yang menghasilkan Desa Salongo Barat, sama sekali bukan bertujuan untuk memecah belah hubungan adat atau kemasyarakatan. Sebaliknya, langkah ini didasari oleh visi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti yang disampaikan oleh Asril Tuadingo, Sekretaris Panitia Pemekaran, dengan adanya dua desa, pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung jauh lebih cepat dan efisien. Dulu, satu kepala desa harus melayani seluruh wilayah Salongo yang luas; kini, dengan terpisahnya secara administratif, jangkauan pelayanan pun semakin dekat. Ini adalah strategi cerdas untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, sebuah perubahan yang fokus pada aspek administrasi demi kemudahan dan kecepatan layanan, bukan pada pemisahan sosial atau adat (Zubaedah & Hafizi, 2022).

Pembentukan sebuah desa dimulai dengan tahap desa persiapan, yang masih menjadi bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun, bergantung pada hasil evaluasi. Selama proses ini berlangsung, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Tokoh masyarakat memegang peranan sentral dalam membina dan mengendalikan perilaku warga agar selaras dengan norma adat, terutama saat muncul potensi konflik atau perselisihan akibat pemekaran desa. Mereka adalah individu yang dihormati dan disegani, berkat keterlibatan aktifnya dalam komunitas, kecakapan, serta sifat-sifat kepemimpinan yang melekat pada diri mereka. Pemekaran desa sejatinya berawal dari inisiatif masyarakat, dengan mempertimbangkan asal-usul desa serta kondisi sosial dan budaya setempat. Penting untuk diingat bahwa setiap daerah otonomi baru harus memberikan dampak positif signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Ia tidak boleh menjadi beban bagi negara, apalagi sekadar alat hegemoni kekuasaan bagi pihak tertentu. Pembentukan desa harus senantiasa selaras dengan kebutuhan riil masyarakat (Latif et al., 2024).

Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik Desa Salongo Barat (2011-2020)

Perekonomian adalah jaringan kompleks yang mengorganisir interaksi ekonomi antarmanusia melalui beragam institusi. Inilah mengapa sistem ekonomi menjadi elemen fundamental dalam masyarakat dan tak terpisahkan dari ideologi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi terus melaju, didorong oleh kemajuan pusat-pusat industrialisasi. Kawasan industri yang berkembang pesat ini tidak hanya memfasilitasi

inovasi, tetapi juga mempermudah pengembangan media informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya berperan krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ariston et al., 2024).

Perkembangan masyarakat Desa Salongo Barat kini tercermin dari tingkat kemajuan desanya. Secara umum, kemajuan desa terbagi menjadi tiga kategori: desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada (Kurniasih & Suhendar, 2021). Kabar baiknya, Desa Salongo Barat saat ini telah berhasil mencapai kategori desa swakarya. Capaian ini ditandai oleh semangat kerja sama yang tinggi di antara warganya, pola pikir yang semakin terbuka, serta intensitas interaksi antar desa yang meningkat. Masyarakat Desa Salongo Barat sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas bercocok tanam ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan budaya mereka. Dalam praktiknya, masyarakat desa juga memiliki beragam kearifan lokal yang mereka gunakan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Potensi ekonomi Desa Salongo Barat merujuk pada kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terpusat pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis desa yang berupa dataran rendah sangat mendukung, menjadikan lahannya ideal untuk budidaya tanaman. Hasil utama dari sektor pertanian Desa Salongo Barat meliputi padi, jagung, dan kelapa. Tak hanya itu, beragam hasil pertanian dan perkebunan lain seperti pisang serta berbagai jenis buah-buahan juga turut memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat desa (Sujana & Fikri, 2023). Perekonomian Desa Salongo Barat berpusat pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian. Hampir 90% penduduknya adalah petani, baik di lahan basah maupun kering. Sebanyak 70% masyarakat bergantung pada budidaya padi sawah, yang menjadi komoditas bulanan unggulan desa. Selain bertani, warga Salongo Barat juga aktif berkebun, menanam komoditas tahunan seperti cengkih, kakao, dan kelapa. Tanaman-tanaman ini merupakan produk unggulan tahunan, dengan 80% masyarakat memiliki kebun cengkih dan kelapa, serta sebagian kecil kakao. Intinya, masyarakat Desa Salongo Barat berkembang sangat pesat, dengan pemenuhan kebutuhan yang memadai berkat sektor pertanian dan perkebunan (Kurniawanto & Anggraini, 2019).

Tahun 2012 menandai titik awal perkembangan ekonomi positif di Desa Salongo Barat, meski masih dalam tahap rintisan, demikian menurut Iskandar Pakaya. Saat itu, program pembangunan desa difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian sebagai penggerak utama. Pertanian, perikanan, dan usaha kecil mendominasi dukungan terhadap kehidupan warga. Program yang dijalankan mencakup pembentukan kelompok tani di persawahan dan perkebunan, serta dukungan bagi kegiatan ibu-ibu PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima dari pemerintah saat itu masih sangat terbatas, hanya Rp5 juta, berbanding jauh dengan kondisi sekarang yang telah mencapai Rp1 miliar. Bantuan yang diterima masyarakat pun terfokus pada alat-alat pertanian dan bibit tanaman. Melalui program pemberdayaan

ekonomi ini, masyarakat desa mulai menguasai keterampilan dan kemampuan dalam mengelola potensi lokal secara mandiri, menjadi fondasi kuat dalam membangun kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Gambar 2 di bawah ini untuk membantu masyarakat Desa Salongo Barat dalam sektor pertanian.



Gambar 2. Bantuan Alata Trektor Untuk Masyarakat Salongo Barat

Sumber: Dokumen Pribadi

Tahun 2014 menandai periode yang signifikan bagi perekonomian Desa Salongo Barat. Pada masa tersebut, masyarakat aktif bergerak di sektor pertanian dan perdagangan. Kenyamanan dan stabilitas kerja kala itu mendorong peningkatan taraf ekonomi, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya pada komoditas jagung dan padi. Selama masa pemerintahan pada tahun tersebut, pembangunan paling fundamental yang dimulai adalah pembangunan Kantor Desa/Balai Pertemuan. Pelaksana Harian (PLH) Sangadi pada tahun 2015-2016, mencatat bahwa mayoritas penduduk Desa Salongo Barat kala itu berprofesi sebagai petani, nelayan, dan tukang. Perekonomian desa dalam periode ini mengalami fluktuasi, dengan kondisi yang tidak selalu stabil. Ada masa ketika hasil pertanian dan perikanan melimpah, namun tak jarang pula terjadi penurunan produksi yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Pada periode tersebut, alokasi Dana Desa Salongo Barat masih dalam bentuk Dana Desa (DDS). Selama kepemimpinannya, fokus pembangunan Desa Salongo Barat adalah infrastruktur jalan, khususnya paving block. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi local (Pangemanan et al., 2014).

Perekonomian Desa Salongo Barat pada periode tersebut mempertahankan stabilitas yang konsisten dan berkelanjutan. Efektivitas penggunaan Dana Desa terbukti signifikan, terutama dalam menopang sektor pertanian. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari inisiatif pemerintah, seperti pengembangan budidaya padi, meskipun potensi ekonomi desa yang lebih luas masih memerlukan eksplorasi untuk pertumbuhan yang komprehensif. Sejak awal pembentukan desa, beragam proyek pembangunan esensial mulai diluncurkan guna memenuhi kebutuhan dasar warga. Fokus utama adalah pembangunan prasarana jalan, khususnya jalan usaha tani yang sangat penting bagi akses petani ke lahan garapan mereka. Tidak hanya itu, Desa Salongo Barat juga melaksanakan pembangunan hunian layak, sarana pendidikan seperti sekolah TK, dan pembaruan masjid (Wardiyanto et al., 2016).

Infrastruktur jalan memegang peran yang sangat strategis sebagai motor utama pembangunan ekonomi, tak hanya di perkotaan, tapi juga hingga pelosok desa. Melalui berbagai proyek pembangunan, sektor ini menjadi fondasi krusial yang menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, mobilitas manusia, aliran uang, hingga pertukaran informasi antar wilayah. Ketersediaan dan kualitas jalan yang mumpuni memungkinkan efisiensi dalam proses distribusi, sehingga biaya logistik dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan harga barang dan jasa di pasar, menjadikannya lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, infrastruktur jalan tidak sekadar mempercepat pergerakan fisik dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan harga antar wilayah. Ini menjadikan jalan sebagai elemen vital dalam menetralkan disparitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Harsono et al., 2025).

Rumah, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, jauh melampaui fungsi fisik semata sebagai pelindung dari panas, hujan, angin, atau ancaman keamanan. Lebih dari itu, rumah adalah wadah vital bagi kelangsungan hidup keluarga, tempat proses reproduksi, internalisasi nilai dan norma, serta arena sosialisasi dan pembentukan pola hubungan sosial berlangsung. Rumah memberikan rasa aman, damai, dan nyaman, sekaligus meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia secara menyeluruh. Pembangunan pada dasarnya adalah transformasi sosial yang berupaya membawa masyarakat menuju kehidupan ideal yang dicita-citakan konstitusi. Dalam proses ini, keberlanjutan dan perubahan menjadi kunci. Keberlanjutan memastikan pembangunan berlanjut tanpa mengorbankan generasi mendatang, sementara perubahan menandakan dinamika adaptif dalam struktur masyarakat menghadapi tantangan zaman. Pembangunan juga bersifat multidimensional, mencakup perubahan struktur sosial, pola pikir, kelembagaan, dan ekonomi. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengurangan kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan. Lebih dari itu, pembangunan adalah proses historis yang terus bergulir, melampaui perubahan fisik dan material, menuju transformasi sikap dan nilai-nilai. Tujuannya adalah mengarahkan manusia melampaui orientasi materi semata, menuju kehidupan yang lebih bermakna secara sosial, budaya, dan spiritual (Zet et al., 2023).

Desa Salongo Barat terus berupaya mengembangkan diri melalui sektor pertanian dan perkebunan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Seiring dengan kemajuan ekonomi, indeks ketahanan sosial dan ekologi atau lingkungan hidup juga mengalami peningkatan. Keselarasan program antara pemerintah dan masyarakat menjadi pengikat yang kuat, sehingga program pembangunan di tingkat desa, daerah, dan pusat dapat tersinkronisasi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingkat pertumbuhan yang tercermin dari perubahan output nasional. Perubahan output dalam suatu perekonomian mencerminkan analisis ekonomi dalam jangka pendek (Suyatno & Suryani, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menelusuri secara mendalam perjalanan Desa Salongo Barat dalam kurun waktu 2011-2020, khususnya terkait sejarah pembentukan, dinamika sosial-ekonomi, dan politiknya, dengan menggunakan lensa Teori Transformasi Sosial dan Teori Pembangunan Lokal. Temuan menunjukkan bahwa pemekaran Desa Salongo Barat berakar kuat dari aspirasi kolektif masyarakat dan inisiatif pemerintahan desa untuk mengatasi kendala geografis dan administratif akibat wilayah induk yang terlalu luas, serta untuk mengoptimalkan potensi Alokasi Dana Desa (ADD) demi pemerataan pembangunan dan percepatan layanan publik. Secara historis, proses ini melibatkan serangkaian musyawarah partisipatif yang masif dan langkah-langkah formal yang menunjukkan kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Pemekaran ini bukan upaya memecah belah komunitas, melainkan strategi administratif untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, sesuai dengan visi pemerataan pembangunan. Dari perspektif ekonomi, Desa Salongo Barat telah bertransformasi dari tahap rintisan pada 2012 dengan anggaran terbatas menjadi desa swakarya yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi. Peningkatan signifikan pada ADD dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, hunian layak, fasilitas pendidikan, dan ibadah, telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Secara sosial, transformasi ini dicirikan oleh peningkatan semangat kerja sama, pola pikir yang lebih terbuka, dan intensitas interaksi antar desa, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap struktur baru yang mengarah pada peningkatan indeks ketahanan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Desa Salongo Barat merupakan contoh nyata bagaimana inisiatif lokal yang didukung kebijakan pemerintah dapat menjadi katalisator bagi transformasi sosial dan pembangunan lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariston, M., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Susanto, H. A. (n.d.). Jejaring Sistem Sosial-

- Ekologi di Kawasan PAAP Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara: Pemahaman Holistik untuk Transformasi Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 171–182. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v14i2.13895>
- Castells, M. (2010). (2010). *he Power of Identity (The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. II)*. Blackwell Publishing.
- Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3), 407–422. <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.369>
- Harsono, I., Sulistiowati, S., Apriyanto, A., & Demung, I. W. (2025). *Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Kurniasih, D., & Suhendar, C. (2021). Karakteristik modeling/profiling wilayah pemilihan desa berdasarkan potensi demografis dan geografis di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 54–67. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.19>
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127–137. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v3i2.71>
- Latif, F. R., Yunus, R., & Hasan, R. (2024). Desa Pilomoni Tahun 1995-2020. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 499–510. <https://doi.org/10.54082/jupin.325>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Mendrofa, Y. F. J., Lase, D., Waruwu, S., & Mendrofa, S. A. (2023). Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v1i1.5>
- Muhtadi, M. (2012). Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.355>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). *Local and Regional Development (3rd*

ed.). Routledge.

- Pangemanan, O. V. L., Mantjoro, E., & Jusuf, N. (2014). Dampak kebijakan moratorium terhadap industri perikanan (Studi kasus kota Bitung). *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 2(4). <https://doi.org/10.35800/akulturasi.2.4.2014.13401>
- Rasid Yunus, Helman Manay, A. K. M. (2023). Puhuwato: Sejarah dan Nilai Kebangsaan. Ideas Publishing.
- Silalah, U. (2023). Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. uwais inspirasi indonesia.
- Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. uwais inspirasi indonesia.
- Sujana, T., & Fikri, Z. (2023). Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(2), 183–192. <http://dx.doi.org/10.51747/publicio.v5i2.1522>
- Suyatno, S., & Suryani, D. A. (2022). Pengembangan potensi UMKM berbasis lokal dalam mendorong perekonomian di Desa Girikerto. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 108–118. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>
- Syahputri, I. B., & Katimin, K. (2024). Pengaruh Aktivis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4), 25–36. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3490>
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Zet, L., Yuniarti, E., Azzahra, S. F., Laia, T. K., & Wulandari, R. (2023). *Monograf Akselerasi Pembangunan Beserta Dampak Lingkungannya*. Mega Press Nusantara.
- Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 865–878. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1432>